BAB IV

DATA SURVEI DAN ANALISIS

4.1 Studi Dasar Terhadap Kawasan

Ngamprah merupakan salah satu kecamatan berkembang dalam lingkup Kabupaten Bandung Barat, dengan luas 3608.08 Ha, Kecamatan ini menjadi pusat dari kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan sebagai wilayah konservasi alam, sebagian wilayahnya didominasi area pertanian dan perkebunan, kawasan Ngamprah di lintasi beberapa jalur antar kota, diantaranya adalah jalan tol padalarang dan rel kereta padalarang, sebelah timur Ngamprah merupakan kawasan wisata alam Lembang dan sebelah barat ngamprah merupakan area pertambangan batu serta industri.

Terdapat beberapa analisis paling mendasar yang menjadi pola pemikiran terhadap pemilihan kawasan Ngamprah sebagai lokasi tapak *project*, diantaranya adalah

1. **Kontekstual Lingkungan Terhadap Konsep dan Fungsi *Project*,** hal ini berkaitan dengan kondisi eksisting ngamprah khususnya area tapak di Desa Ngamprah memiliki identitas sebagai pedesaan produktif, produktif yang dimaksud dalam *project* ini adalah potensi dari alam, aktifitas ekonomi, dan masyarakat yang aktif
2. **Orientasi Kawasan,** berada di pusat perkotaan padalarang memberi keuntungan lebih terhadap aspek aksesibilitas menuju kawasan Ngamprah. Dalam lingkup makro, Ngamprah dapat di capai oleh beberapa moda transportasi antar Kota-Provinsi melalui stasiun kereta Padalarang, Tol Padalarang, Jalan Padalarang-Cianjur. Orientasi wilayah terhadap kota lain menyebabkan timbulnya aktifitas masyarakat luar, hal ini mendorong pemerintah mengembangkan dan melakukan perbaikan infrastruktur secara berkala dibandingkan dengan kawasan lain di Kabupaten Bandung

Barat. Dalam lingkup mikro, orientasi kawasan Ngamprah tertuju pada kegiatan ekonomi wisata dan ekonomi industri, dengan jarak 12 Km dari kawasan lembang, pelebaran wisata mulai mendekati kawasan Ngamprah yaitu daerah cisarua yang berjarak sekitar 5 Km dari kawasan Ngamprah, dan dari segi ekonomi industri, dengan jarak 4 Km dari kawasan Ngamprah, terdapat daerah Cimareme sebagai lingkungan produktif industri skala besar. Yang dimaksud dengan potensi orientasi kawasan di atas adalah kawasan yang dibutuhkan sebagai lokasi tapak *project* di area pedesaan, namun memiliki perhatian dan program perbaikan infrastruktur kedepan dengan kemungkinan besar dan potensi kegiatan lokal yang berindikasi terhadap kebutuhan tenaga dari masyarakat Ngamprah, hal ini berkaitan dengan fungsi pemberdayaan masyarakat dari *project* ini sendiri.

3. **Indentitas *Project*,** guna memberi efek positif dari sebuah *project* pembangunan dalam skala besar, maka dibutuhkan alasan sebuah perencanaan tapak terhadap dampaknya bagi kawasan. Dari hasil survey dan analisis lapangan, terdapat satu bangunan peribadatan umat muslim dengan dimensi massa yang cukup megah, yaitu 100 m dari komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, pembangunan Masjid ini diindikasikan terhadap peralihan kegiatan lokal dari wilayah luar Ngamprah menuju ruang-ruang dalam Ngamprah, orientasi dari area ini dapat menangkap view kota di wilayah selatan dan barat, khususnya di area selatan dapat menangkap *foreground* komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi bagian dari rencana *project* untuk memperkuat identitas agamis dalam satu koridor panjang yang sering dilalui masyarakat, dimana koridor ini menghubungkan antara kawasan Bandung barat dan kawasan Bandung utara

sebagai gambaran tentang salah satu motto Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten yang agamis.



Gambar 4.1
Logo Kabupaten Bandung Barat
Sumber : BUKU RDTR PEMKAB KBB

4.2 *Cultural mapping* Terhadap Isu Kawasan

Dari beragam analisis mendasar di lapangan, dibutuhkan data menunjang untuk memperkuat identifikasi terhadap rancangan seperti apa yang tersingkronisasi antara kawasan terhadap *project*, fungsi, tema, konsep dan lain-lain. Yang menjadi pedoman dalam *cultural mapping* dalam analisis ini adalah Materi PERDA RDTR dan RTRW Kabupaten Bandung Barat[24], Peta RDTR Perkotaan Padalarang, Matriks Indikasi Program, Peta Struktur Ruang, dan Penunjang lainya yang terkandung dalam PERDA Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta wawancara pada pihak-pihak terkait seperti dinas tata ruang, kesejarahan dan lainnya.

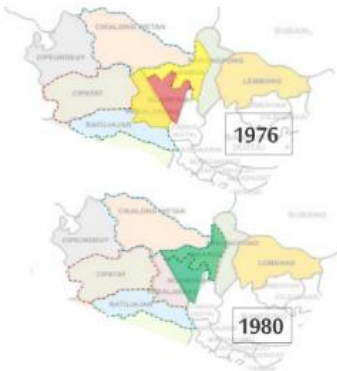
4.2.1 Perkembangan Ngamprah Melalui Kesejarahan

Dalam lingkup Kabupaten, Ngamprah merupakan satu kecamatan dari 16 kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat awalnya menyatu dengan teritori Kabupaten Bandung, namun pada Tahun 1999 dengan alasan luas wilayah kabupaten yang cukup besar, maka Kabupaten Bandung Barat melakukan pemekaran dari teritori Kabupaten.

Ngamprah berasal dari kata “amprah”, yang memiliki arti keinginan untuk maju, awalnya ngamprah hanya bagian dari lingkup kecil kelurahan padalarang, kata ngamprah ini dibuktikan, hanya dengan 4 Tahun sejak

[24] Peraturan NO 24 Tahun 2009 tentang RDTR Perkotaan Padalarang 2009-2028, PERDA NO 2 Tahun

1976-1980, kecamatan Ngamprah mampu memisahkan diri menjadi sebuah kecamatan dengan 7 Desa di dalamnya.[25] Kondisi seperti ini menunjukan obsesi dari masyarakatnya yang cukup maju dalam berfikir dan bertindak. Ngamprah memang memiliki visi yang produktif sejak dahulu untuk dipersiapkan menjadi suatu kawasan yang akan berkembang melalui masyarakatnya sendiri, namun kondisi perekonomian yang tidak mendukung menjadi hambatan pada umumnya pedesaan-pedesaan di Indonesia. Ngamprah diresmikan pada tahun 1980 oleh bapak Aan Khunaefi yang pada saat itu adalah Gubernur ke-11 Jawa Barat, potensi yang dimilikinya terus dikembangkan hingga saat ini, identitasnya sebagai kawasan konservasi tetap di pertahankan oleh penduduknya sebagai sikap perlindungan terhadap tempat asalnya. Saat ini Kecamatan Ngamprah memiliki 11 Desa, terdapat 4 Desa baru, dan 3 dari seluruh desa di kecamatan Ngamprah merupakan area perekonomian maju dari berbagai bidang, yaitu Ds. Cimareme, Ds, Paku Haji, Ds. Ngamprah, hingga pada 17 juli 2008 Ngamprah diresmikan sebagai pusat dari kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin Bupati H. Abu Bakar dengan alasan, aksesibilitas, lingkungan sekitar.



Gambar 4.2
Perkembangan Teritorial Ngamprah
Sumber : Panduan Hasil Pemetaan Kawasan Ngamprah

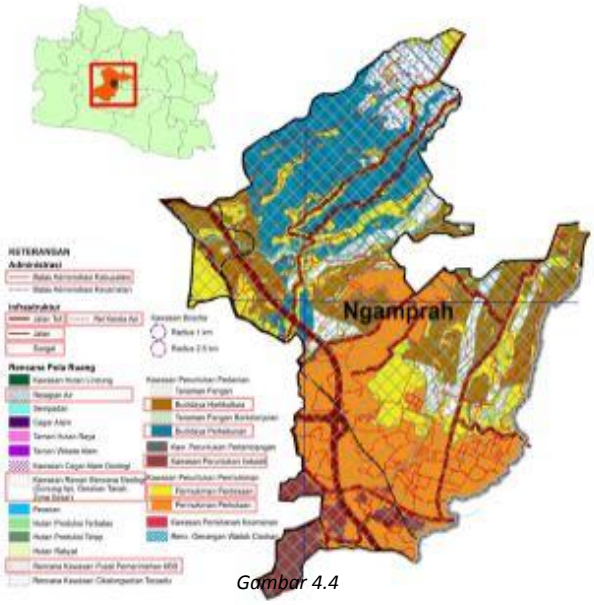


Gambar 4.3
H. Aang Khunaefi
Sumber : Data Pejabat PEMPROV JABAR

[25] Peraturan NO 24 Tahun 2009 tentang RDTR Perkotaan Padalarang 2009-2028, PERDA NO 2 Tahun

4.2.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Ngamprah

Terdapat 4 isu yang berkembang tehadap pola ruang kawasan Ngamprah yaitu pola ruang berkaitan dengan aksesibilitas, pola ruang berkaitan dengan konsentrasi wilayah kantor pemerintahan Bandung Barat dan pola ruang terhadap konservasi, ke 3 isu tersebut berkaitan dengan pola lingkage linear kawasan yang menganut ruang megaform, dimana ruang-ruang tersebut terbentuk tidak melalui perencanaan awal, namun terjadi karena kebutuhan suatu fungsi dan fungsi tersebut membutuhkan fungsi lain, hingga terbentuk susunan pola ruang yang tidak tersusun pada kawasan.



Gambar 4.4

Peta Rencana Pola Ruang Kec. Ngamprah

Sumber : RTRW PEMKAB Bandung Barat[26]



Gambar 4.5

Komplek Pemerintahan KBB



Gambar 4.6

Kawasan Pertanian Ngamprah

1. **Pola ruang berkaitan dengan aksesibilitas,** perencanaan dinaikannya kelas jalan kawasan Ngamprah diantaranya adalah jalan kolektor Ngamprah akan di naikan menjadi jalur arteri, pembukaan akses jl tol dari cipuularang menuju ngamprah, serta stsiun di kawasan ngamprah sebelum masuk ke Padalarang, aksesibilitas ini berkaitan dengan potensi kemudahan pencapaian

[26] PERDA NO 2 Tahun 2012 RTRW KBB *BAB V Paragraf 4 Bagian ke 2 tentang Rencana Pola Ruang*

bagi masyarakat yang tidak mengetahui letak Ngamprah dalam perkotaan Padalarang. Salah satu contoh dari program ini adalah pelebaran jalan serta peningkatan kualitas jalan di sepanjang koridor Ngamprah-Padalarang-Cisarua.[27]

2. **Pola ruang berkaitan dengan konservasi,** 293 Ha dari 2822 Ha area pertanian di kawasan Ngamprah harus terpakai maksimal, dan 1076 Ha dari 14908 Ha area resapan Ngamprah harus tetap terpakai sebagai area resapan air, kemunculan komplek pemerintahan Kabupaten Bandung Barat lambat laun merubah kondisi di lapangan, peningkatan kegiatan lokal di kawasan Ngamprah menarik pembangunan yang merubah fungsi konservasi menjadi ruang tertutup, salah satu contohnya adalah peningkatan pembangunan perumahan di area Ngamprah, meskipun dengan perbandingan yang sedikit namun banyak berindikasi terhadap ketertarikan investor lalinnya.[28]

3. **Pola ruang berkaitan dengan konsentrasi wilayah KBB,** peningkatan infrastruktur di kawasan KBB ini berjalan searah dengan kebutuhan pemerintahan terhadap pusat pelayanan sosial seperti pelengkapan kantor administrasi, kantor sosbudpol, tata ruang dll. Pemerintah juga mempersiapkan sebagian kawasan Ngamprah untuk dijadikan area Pendidikan, semangkin banyak kebutuhan pelayanan sosial dan pelayanan umum, maka peningkatan infrastruktur pun ditingkatakan, hal ini yang mengurangi kualitas serta konsistensi wilayah konservasi secara berkala.

Dalam pola pemikiran secara analisis, ke 3 isu tersebut ada indikasi dengan penguatan batas-batas teritorial Kabupaten Bandung Barat bersangkutan dengan wilayahnya berada di perbatasan kota yang rentan dengan penggunaan fasilitas dan aktifitas area yang buka wilayah kotanya, diataranya wilayah utara

[27] PERDA NO 24 Tahun 2009 RDTR Perkotaan Padalarang, *BAB V Paragraf 3 Pasal 31*

[28] PERDA NO 24 Tahun 2009 RDTR Perkotaan Padalarang, *BAB V Paragraf 1 pasal 34*

berbatasan dengan Purwakarta, Timur dengan Cimahi, utara dengan Subang, Selatan dengan Kota Madya Bandung.[29]

4.2.3 Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Ngamprah



Gambar 4.7

Peta Jaringan Prasarana Wilayah Kec. Ngamprah

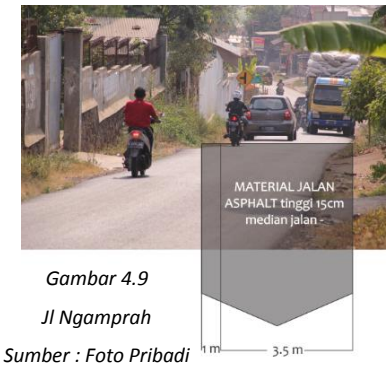
Sumber : RTRW PEMKAB Bandung Barat[30]



Gambar 4.8

Rencana Pembukaan Akses Tol

Sumber : Foto Pribadi



Gambar 4.9

Jl Ngamprah

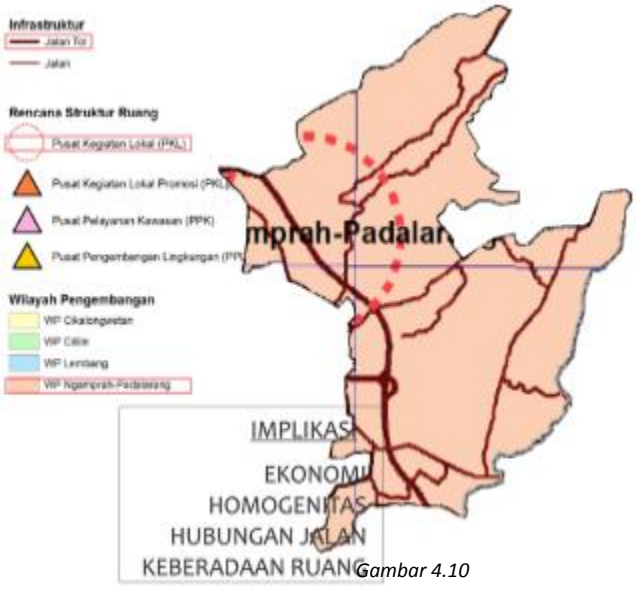
Sumber : Foto Pribadi

Dari hasil studi di lapangan, terdapat isu peningkatan prasarana yang dilihat dalam *cultural mapping* ini diantaranya adalah orientasi pengembangan kawasan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya listrik dan peningkatan kelas jalan, untuk digunakan sebagai lintasan distribusi kendaraan kecil dan besar, yaitu wilayah dalam Ngamprah di perbatasan menuju Cisarua, data dilapangan menunjukan sutet yang berada di area-area pedalaman, dan lebar jalan yang diperluas hingga 1.5 meter di bahu masing-masing arah.

[29] PERDA NO 24 Tahun 2009 RDTR Perkotaan Padalarang, *BAB V Paragraf 8 pasal 42*

[30] PERDA NO 2 Tahun 2012 RTRW KBB *BAB V Paragraf 2 Bagian ke 4 pasal 47*

4.2.4 Rencana Struktur Ruang Kawasan Ngamprah



Gambar 4.10

Peta Struktur Ruang Kec. Ngamprah

Sumber : RTRW PEMKAB Bandung Barat[31]



Gambar 4.11

Kawasan Ds. Pasir Jengkol

Sumber : Foto Pribadi



Gambar 4.12

Pembangunan Masjid Raya Bandung Barat

Sumber : Foto Pribadi

Berkaitan dengan wilayah Ngamprah yang didominasi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, ada sikap dari pemerintah untuk melakukan pengalihan struktur ruang kota pada Ngamprah menjadi Pusat dari kegiatan local, beberapa hal yang manjadi perhatian adalah peningkatan kualitas ekonomi Ngamprah, dengan recana pembukaan area perdagangan, dari segi sosial adanya pembangunan plaza Ngamprah dan Masjid Raya bandung Barat menarik perhatian terhadap kegiatan Lokal di kawasan ini, hal tersebut juga di dasari dari ketersediaan ruang yang menunjang.

4.2.5 Peta Rawan Bencana Kawasan Ngamprah

Ngamprah didominasi oleh wilayah dengan gerakan tanah sedang, namun pada pusat kawasan Ngamprah, tanah menjadi pertimbangan terhadap konstruksi pembangunan, peta ini menjadi bahan pertimbangan

[31] PERDA NO 24 Tahun 2009 RDTR Perkotaan Padalarang, *BAB V bagian pertama pasal 28*

terhadap struktur dan dimensional bangunan dalam perancangan karena lokasi *project* berada di kawasan dengan intensitas gerakan tanah menengah.



Gambar 4.13

Peta Rawan Bencana Kec. Ngamprah

Sumber : RTRW PEMKAB Bandung Barat[32]



Gambar 4.14

Kawasan Cisarua

Sumber : Foto Pribadi



Gambar 4.15

Ds. Pasir Kihiyang

Sumber : Foto Pribadi

4.2.6 Action Plan

Dari data studi, ditarik sebuah action plan untuk menanggapi isu permasalahan di kawasan Ngamprah, yaitu:

1. Mempertahankan fungsi dan konsistensi peraturan RTRW Ngamprah sebagai wilayah konservasi ditengah penggerusan wilayah dengan fungsi ruang tertutup
2. Meremajakan area yang tidak diperhatikan dan diindikasikan menjadi potensi ruang pembangunan namun memiliki potensi sebagai wilayah konservasi alam
3. Memperkuat identitas kawasan melalui *project* nilai sosial, budaya,
4. Memasukan fungsi *project* pada rencana pemerintah yang memiliki kepentingan dan dampak positif bagi alam, mampu membantu

[32] PERDA NO 24 Tahun 2009 RDTR Perkotaan Padalarang, *pasal 12*

program pemerintah terhadap perekonomian kawasan, serta beredukasi tinggi bagi masyarakat.

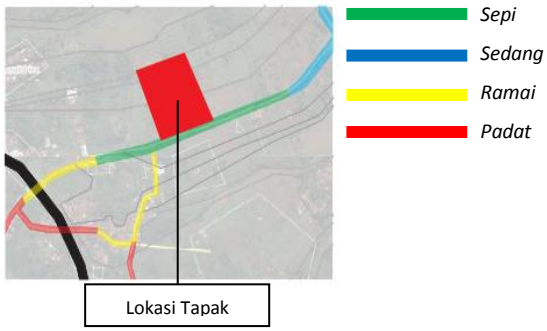
5. *Project* tugas akhir mampu menjadi bagian dari solusi

4.2.7 Implemetasi Pada Kawasan

1. Ruang bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal
2. Ruang bagi kegiatan berlatar belakang edukasi dan agama
3. Ruang bagi kegiatan lokal kawasan, *movement&non-movement activity*
4. Pemanfaatan Alam sebagai usaha budi daya
5. *Project* sebagai usaha menyeimbangkan kawasan

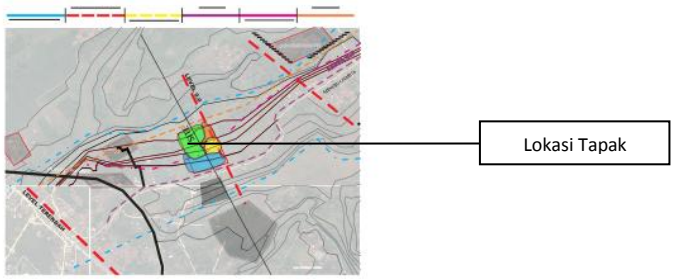
4.3 Analisis Tapak

4.3.1 Analisis Sirkulasi



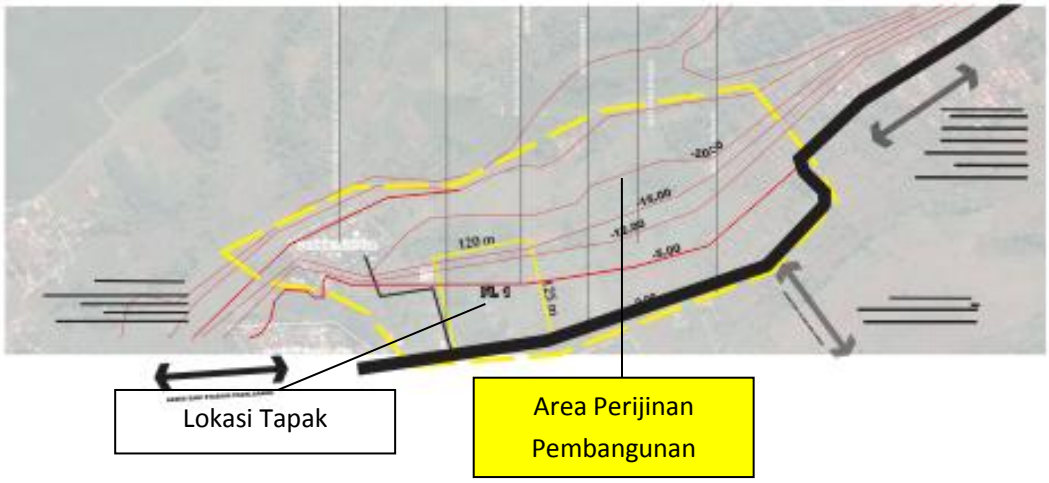
Gambar 4.16
Peta Kepadatan Sirkulasi
Sumber : Hasil Survei

4.3.2 Analisis Topografi



Gambar 4.17
Peta Topografi Kawasan
Sumber : Panduan Hasil Pemetaan Topografi Tata RuangPEMDA KBB

4.3.3 Analisis Peruntukan Tapak

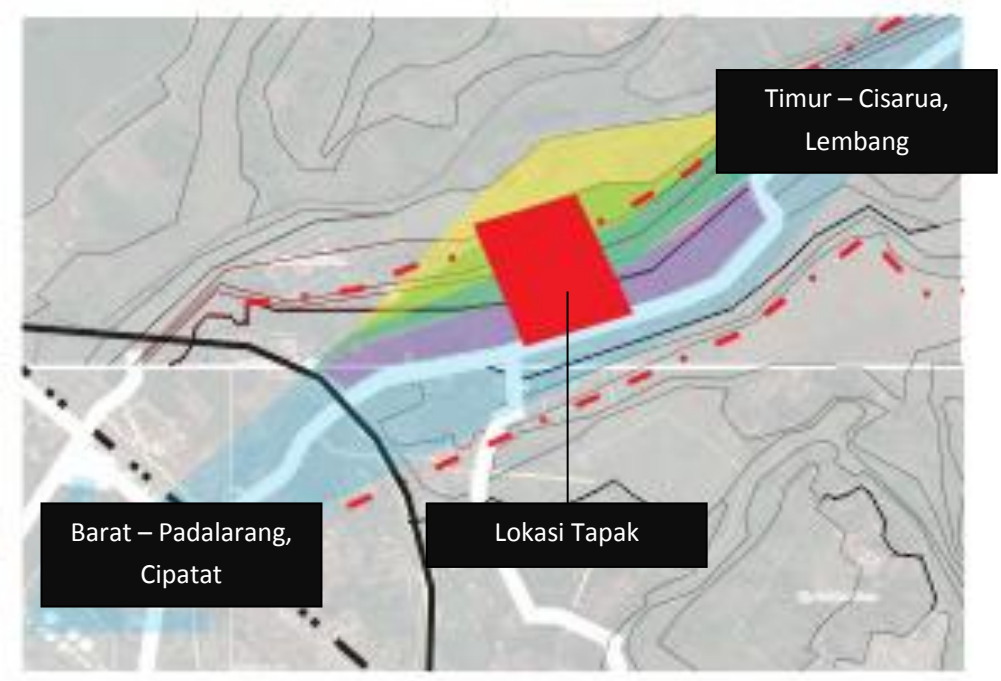


Gambar 4.18

Peta Peruntukan Tapak

Sumber : Panduan Hasil Pemetaan Peruntukan Cipta Karya PEMDA KBB

4.3.4 Analisis Orientasi Tapak

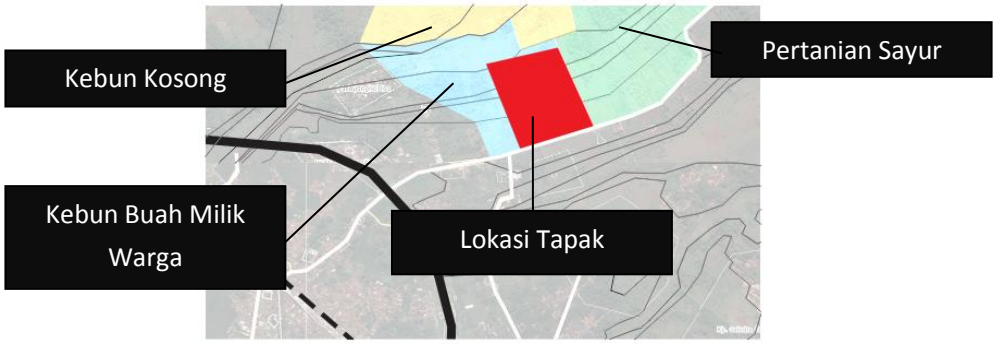


Gambar 4.19

Analisis Orientasi Tapak

Sumber : Panduan Hasil Pemetaan Orientasi Kawasan Tata Ruang PEMDA KBB

4.3.5 Analisis Eksisting

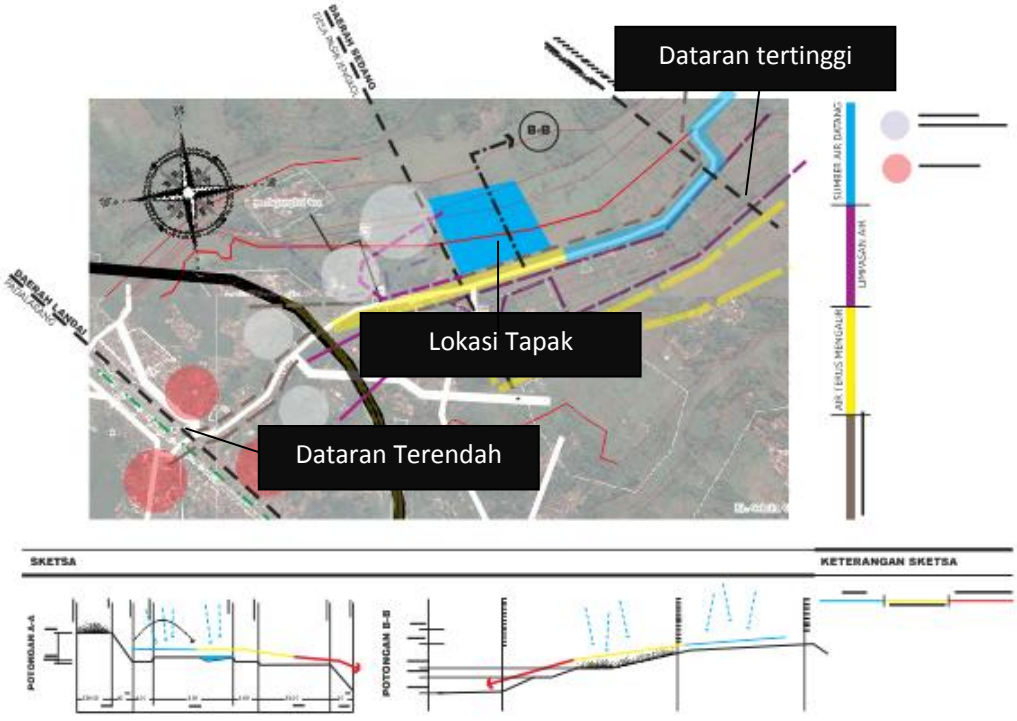


Gambar 4.20

Peta Eksisting Lingkungan

Sumber : Hasil Survei

4.3.6 Analisis Curah Hujan Terhadap Tapak

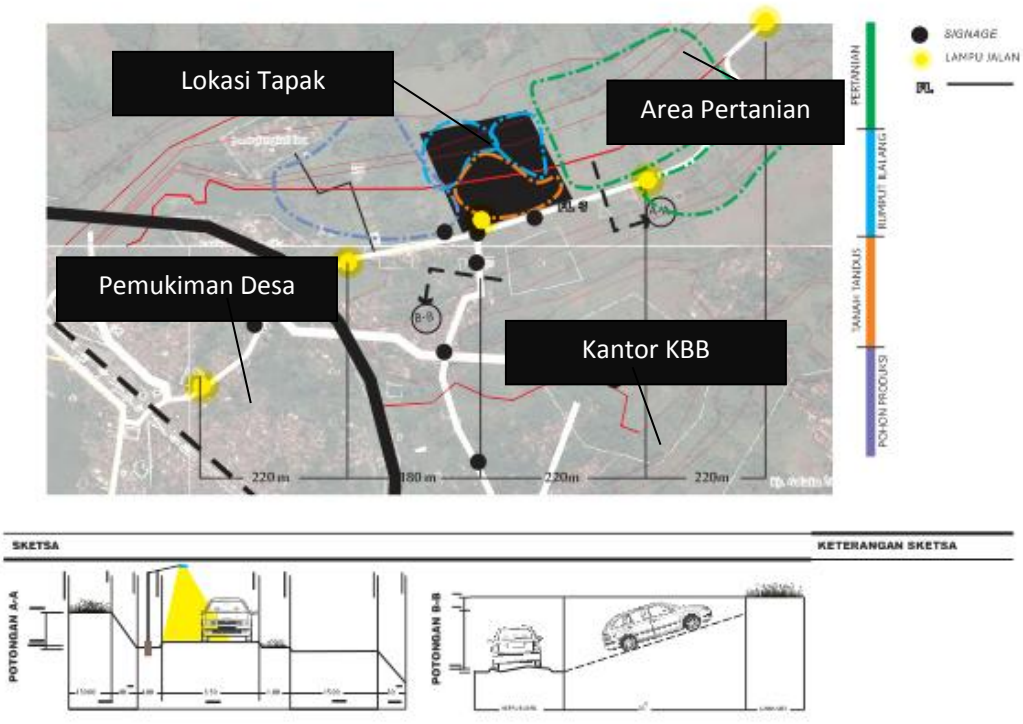


Gambar 4.21

Peta Curah Hujan

Sumber : Panduan Hasil Pemetaan Resapan Air Bidang Fisik PEMDA KBB

4.3.7 Analisis Infrastruktur Sekitar Tapak

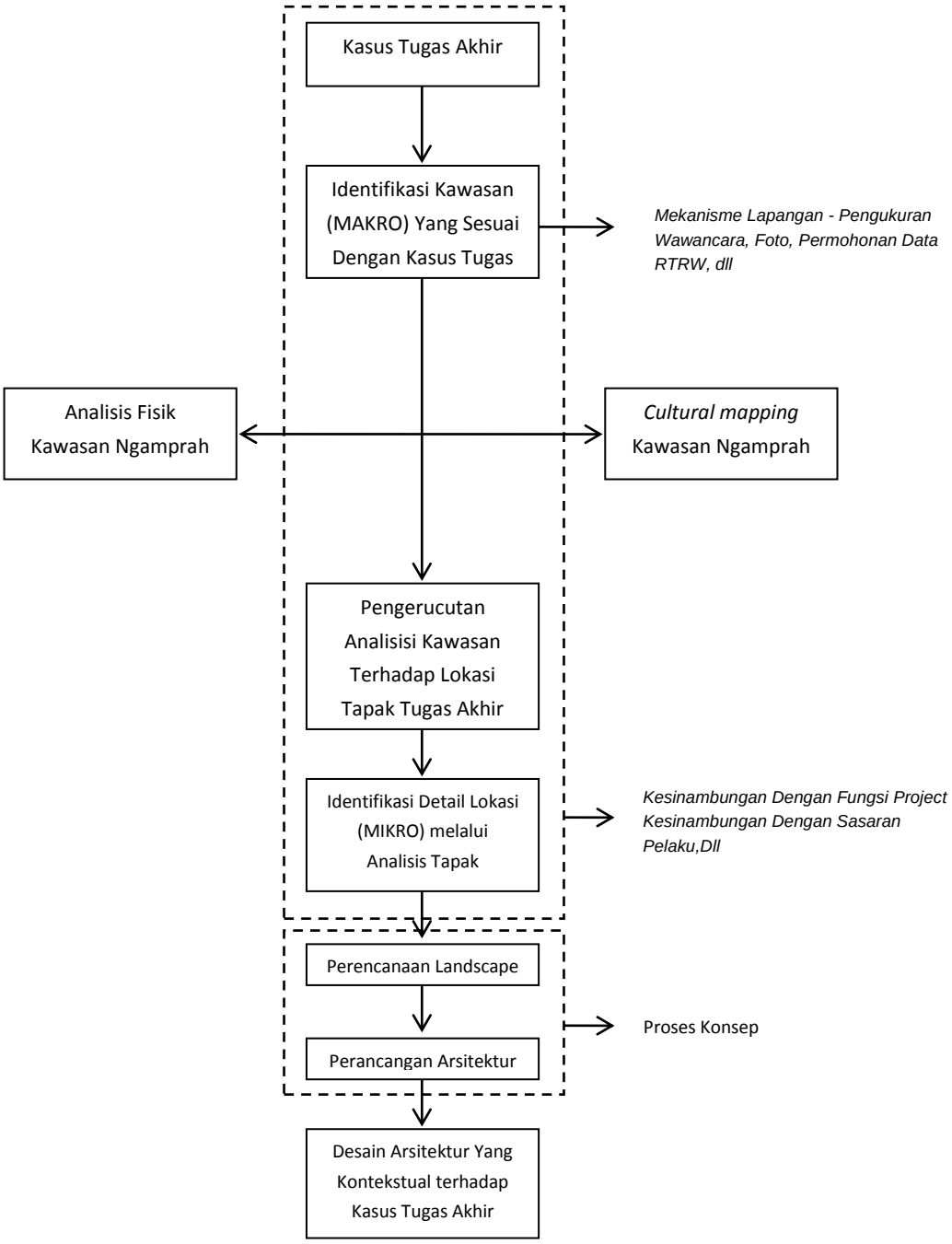


Gambar 4.22

Peta Infrastruktur

Sumber : Hasil Survei

4.4 Alur Pemilihan Tapak



Gambar 4.23

Alur Pemilihan Pemilihan Tapak